

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Mesin Parkir Solusi Terbaik Dongkrak Retribusi
Entitas / Cakupan	: Kota Bandung
Sumber / Hal	: Tribun Jabar/ Hal. 1
Edisi	: Selasa, 8 April 2018

Mesin Parkir Solusi Terbaik Dongkrak Retribusi

BANDUNG, TRIBUN - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Didi Ruswandi, menegaskan terminal parkir elektronik (TPE) atau mesin parkir adalah solusi terbaik dan telah banyak diterapkan oleh kota-kota di dunia. Sejak lama, penggunaan mesin parkir menjadi andalan untuk mengolektifkan retribusi sekaligus mendidik masyarakat untuk berdisiplin.

Berdasarkan catatan Dinas Perhubungan Kota Bandung, penggunaan mesin parkir ini mendapat sam-

butan yang baik dari masyarakat. Sebulan setelah diluncurkan, tepatnya pada Agustus 2017, pendapatan dari retribusi parkir elektronik mencapai Rp 72,7 juta. Pada September 2017, pendapatan melonjak menjadi Rp 227,9 juta.

Pada bulan November 2017, retribusi dari mesin parkir mencuat menjadi Rp 439,9 juta. Sedangkan pendapatan dari parkir manual berada di angka Rp 326,8 juta.

Sejak saat itu, tren pendapatan dari retribusi TPE cenderung meningkat. Pada April 2018, pendapatan dari TPE naik tajam menjadi Rp 525,4 juta.

"Melihat tren ini, kami optimistis bahwa TPE akan terus membaik. Memang pendapatannya belum sebanding dengan investasi. Tapi hal itu bisa dibilang wajar karena *break even point* investasi semacam ini tak mungkin bisa terjadi dalam waktu setahun," ujar Didi di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Senin (7/5).

Untuk itu juga, Dishub Kota Bandung terus memperbaiki sistem pengelolaan parkir TPE. Salah satunya dengan membina para juru parkir. Sejauh ini, ujarnya, sudah ada 600 juru parkir TPE yang beroperasi. Para juru parkir mengikuti pelatihan agar bekerja secara profesional dan berintegritas. Selain itu, ada 24 orang pengawas yang memastikan sistem di lapangan berjalan dengan baik.

Di Kota Bandung, sebanyak 445 mesin parkir di 57 titik telah dioperasikan. Pengadaan 445 mesin itu dilakukan melalui sistem e-katalog. Total biayanya Rp 55,8 miliar, sudah termasuk pemasangan. Investasi ini hasil duduk bersama antara Pemerintah Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung. Teknologi ini dipilih karena dinilai lebih menguntungkan.

"Kami sudah sepakat waktu itu dengan DPRD

bahwa jalan ini yang dipilih. Dulu, awalnya akan dikelola oleh pihak ketiga, tetapi karena regulasi belum memungkinkan, akhirnya tetap kami kelola sendiri dulu," ujar Didi.

Menurut Didi, tugas utama pemerintah saat ini adalah terus mengedukasi dan menyosialisasikan kepada masyarakat tentang teknologi baru ini. Dishub Kota Bandung secara simultan melalui berbagai media terus mengkampanyekan penggunaan TPE.

"Masyarakat jelas perlu beradaptasi. Ini salah satu penyebab penggunaan mesin parkir belum optimal. Jadi, bukan salah teknologinya. Kita sudah selangkah lebih maju. Kalau sampai mundur, sampai kapan kita tertinggal dari kota-kota lain di dunia," katanya optimistis.

Dukungan Perbankan

Gagasan visioner penggunaan TPE di Kota Bandung mendapat apresiasi dari banyak pihak. Salah satunya Bank Indonesia (BI). Bank sentra Indonesia ini menilai TPE telah mendukung gerakan nontunai dan menciptakan *cashless society*.

Sejauh ini sudah ada empat bank yang bekerja sama dalam program TPE ini, yakni BJB, BNI, BRI, dan Bank Mandiri. Masyarakat yang memiliki kartu uang elektronik dari bank-bank tersebut bisa langsung menikmati fasilitas TPE di 57 titik di Kota Bandung.

Menurut Sekretaris Dishub Kota Bandung, Anton Sunarwibowo, bank-bank tersebut mendukung karena BI telah mengakui keberadaan TPE.

"Dukungan yang paling berarti bagi kami adalah dari masyarakat. Saat kami

menyosialisasikannya di Braga, warga langsung bersedia membeli kartu uang elektronik. Hanya saja, kami masih harus terus berusaha membujuk pengguna sepeda motor yang masih enggan menggunakan uang elektronik," kata Anton.

Ia mengatakan, Dishub Kota Bandung akan mengencarkan kampanye penggunaan TPE ini ke berbagai pihak. Makin banyak dukungan terhadap program ini, kata dia, makin baik untuk proses pembangunan Kota Bandung.

"Uang retribusi yang masuk akan bisa kami manfaatkan kembali untuk masyarakat. Lebih baik daripada memberikannya untuk oknum-oknum yang tidak jelas di titik-titik parkir liar. Kami imbau masyarakat lebih cerdas melihat situasi," kata Anton.

Anton mengatakan, setiap bulan mereka akan melakukan evaluasi, baik dari segi fasilitas maupun SDM. "Kami tidak mau main-main. Ada *reward* dan *punishment* yang tegas dan berkeadilan. Sampai saat ini saja kami telah memutasi delapan pengawas karena berkinerja kurang optimal. Ada juga satu petugas parkir yang terpaksa kami putus kontraknya karena tidak bisa diajak bekerja sama," ujarnya.

Ia berharap, sistem ini bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dengan begitu, setahap demi setahap Kota Bandung bisa menjadi kota yang naik kelas, sejajar dengan kota lain di dunia. "Kami mohon kepercayaannya, selagi kami terus berusaha memperbaiki diri dan menghadirkan solusi terbaik untuk masyarakat," ujarnya. (*)